

LAMPIRAN XXIX

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI



**RENCANA STRATEGIS
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026**

KATA PENGANTAR

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimasa transisi antar periode RPJMD, penyusunan RKPD mengacu pada RPJPD, namun RPJPD Kota Bekasi juga akan berakhir pada tahun 2025. Pemerintah Kota Bekasi sebagai upaya mengisi kekosongan rencana pembangunan jangka menengah dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023, oleh sebab itu Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi sebagai salah satu perangkat daerah Kota Bekasi juga menyusun Rencana Strategis dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 menyesuaikan mengikuti situasi dan kondisi Kota Bekasi saat ini.

Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini disusun untuk memberikan arah dan menjadi acuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan, terutama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi setiap tahunnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan serta masukan untuk perbaikan selanjutnya, oleh sebab itu kami mohon masukan dan saran dalam penyempurnaan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi agar lebih baik di masa mendatang.

Bekasi, 28 Februari 2023
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kota Bekasi,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd., MM., MBA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650604 198803 1 019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BEKASI	14
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	47
3.3 Telaahan Renstra K/L Kearsipan dan Perpustakaan	51
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	59
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	69
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Arsip dan Perpustakaan	69
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	73
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	79
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	93
BAB VIII PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.....	14
Tabel 2.2	Kelompok pegawai menurut fungsi.....	22
Tabel 2.3	Komposisi pegawai menurut pendidikan.....	23
Tabel 2.4	Komposisi pegawai berdasarkan golongan/ruang.....	23
Tabel 2.5	Komposisi pegawai menurut status kepegawaian.....	23
Tabel 2.6	Kebutuhan dan Ketersediaan Jabatan Fungsional Arsiparis..	24
Tabel 2.7	Kebutuhan dan Ketersediaan Jabatan Fungsional Pustakawan.....	24
Tabel 2.8	Sarana dan prasarana Dinas Arsip dan Perpustakaan 2020	25
Tabel 2.9	Volume arsip urusan kearsipan.....	28
Tabel 2.10	Jumlah koleksi buku urusan perpustakaan.....	28
Tabel 2.11	Data sistem Informasi Dinas Arsip dan Perpustakaan	28
Tabel 2.12	Kinerja Pelayanan Urusan Kearsipan.....	33
Tabel 2.13	Komposisi jumlah perpustakaan Kota Bekasi.....	34
Tabel 2.14	Data Perkembangan Perpustakaan Umum Kota Bekasi.....	37
Tabel 3.1	Rekapitulasi MONEV Kearsipan 2019.....	45
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Urusan Kearsipan dan Perpustakaan.....	50
Tabel 3.3	Isu-isu strategis urusan kearsipan	59
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2019 – 2023.....	71
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Arsip dan Perpustakaan 2018-2023.....	73
Tabel 6.1	Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Dinas	81

Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi 2020-2023.....

Tabel 7.1

Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Bekasi.....

93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	21
Gambar 2.2	Variabel dan Indikator Monitoring dan Evaluasi Kearsipan.....	32

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Tahun 2024 merupakan masa transisi antara periode 2018-2023 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bekasi. Saat ini belum terdapat dokumen RPJMD yang menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD Tahun 2024, sehingga berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, dapat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Namun RPJPD Kota Bekasi juga akan berakhir pada tahun 2025, sehingga Kementerian Dalam Negeri mengarahkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai upaya mengisi kekosongan RPJMD yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah otonomi baru (DOB). Potensi keterlambatan pelantikan Kepala Daerah hingga 2026 juga salah satu sebab di susunnya Rancangan Awal RPD 2024-2026, penyusunan tersebut juga bersamaan dengan penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Kota Bekasi menyusun dan menetapkan RENSTRA Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Dalam Rencana Strategis Disarpusda Tahun 2024-2026 dirancang untuk menyelesaikan target kinerja yang belum tercapai dan perlu ditingkatkan dengan menggunakan program yang sama sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa setiap organisasi perangkat daerah membuat dokumen rencana pembangunan yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah milik perangkat daerah, renstra mempunyai peran yang sangat penting terutama sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah setiap tahunnya.

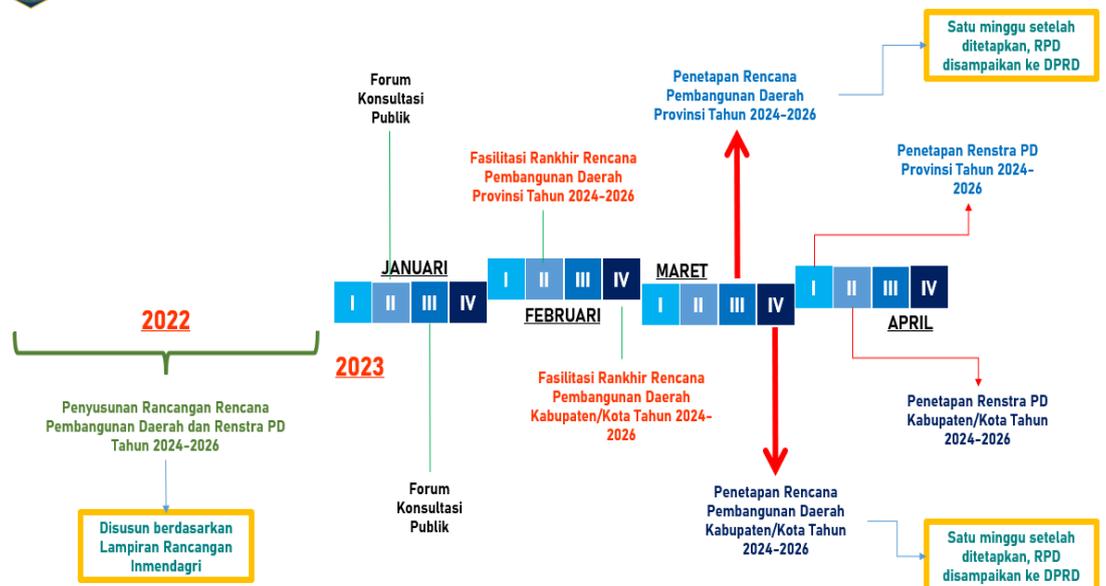
Renstra menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan perangkat daerah kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya sebagai tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan, sasaran dan program kepala daerah. Renstra berisikan langkah-langkah mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah setiap tahunnya.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi menyusun dokumen renstra yang memuat program-program pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Didalam renstra ini dijabarkan potret permasalahan serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kota Bekasi sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Dalam proses penyusunan renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah telah mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara spesifik penyusunan renstra perangkat daerah mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan RPD dapat dilihat dalam gambar berikut :



Sumber : Paparan Narasumber Ditjen Bangda Kemendagri - 2022

Gambar 1.1. Waktu Penetapan Dokumen Rencana Tahun 2024-2026 Berdasarkan INMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2022

Selanjutnya, dalam proses penyusunan Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2024-2026, dilakukan penelaahan Renstra Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024 dan Renstra Arsip Nasional RI Tahun 2020-2024 sebagai lembaga vertikal yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Disamping itu, dilakukan penelaahan Rancangan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. penelaahan ini bertujuan agar dokumen perencanaan Disarpusda Kota Bekasi selaras dengan perencanaan pemerintahan pusat dan provinsi.

1.1 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 adalah:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

- e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;

- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- r. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
- s. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
- t. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023
- u. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
- v. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- w. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- x. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
- z. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.
- aa. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang berisi langkah-langkah strategis Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPD, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah dalam jangka waktu 3 tahun ke depan;
2. Menyediakan acuan resmi bagi perangkat daerah dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Renja PD;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan Perangkat Daerah, dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPD;
4. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (stakeholders);
5. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan perangkat daerah;
6. Memelihara kesinambungan proses dan hasil- hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Renstra serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan, telaahan visi, misi dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Perpustakaan Nasional RI dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi selama Tahun 2024 – 2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Perpustakaan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang kemudian diturunkan kembali ke Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. Disebutkan dalam perwal tersebut Disarpusda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, yang meliputi bidang kearsipan, pengembangan dan informasi kearsipan, pengembangan koelksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Disarpusda menyelenggarakan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan

yang berlaku;

- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Adapun susunan organisasi Disarpusda Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kearsipan;
- d. Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan;
- e. Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
- f. Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Sekretariat terdiri dari :

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- B. Kelompok Jabatan Fungsional;

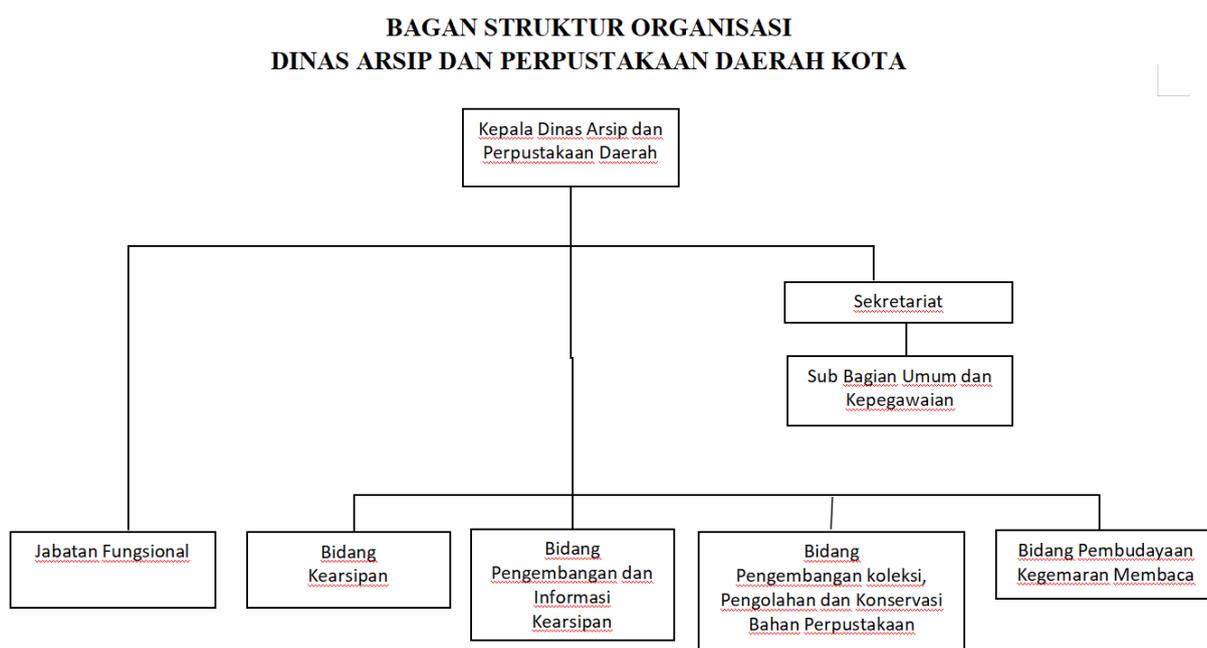
Bidang Kearsipan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas di bidang kearsipan yang meliputi pembinaan dan pengelolaan kearsipan dinamis, kearsipan statis dan preservasi serta pembinaan SDM kearsipan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya. Bidang kearsipan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi layanan kearsipan, data dan informasi kearsipan, pengembangan pemanfaatan teknologi informasi kearsipan dan pengawasan kearsipan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pengembangan Koleksi Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi layanan perpustakaan, otomasi dan pengolahan perpustakaan serta pengembangan dan pelestarian koleksi perpustakaan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pengembangan Koleksi Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan pembudayaan kegemaran membaca serta kerja sama, promosi dan jejaring perpustakaan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi dan Tata Laksana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi bisa dilihat dari gambar 2.1., berikut ini :



Sumber : Disarpusda, 2021

Tugas pokok dan fungsi Disarpusda merupakan penjabaran dari kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang kemudian diturunkan ke Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18

tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai berikut :

Dalam urusan perpustakaan Disarpusda memiliki tugas :

1. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
2. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
3. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
6. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) berperan aktif dalam melaksanakan :

1. Pengelolaan arsip statis yang diterima dari perangkat daerah pemerintah daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan
2. Pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
3. Manajemen arsip yang meliputi: pembinaan terhadap manajemen arsip dinamis sejak penciptaan sampai dengan penyusutan, naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, klasifikasi akses, penataan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, pemindahan arsip, penyerahan arsip statis, dan pemusnahan arsip.
4. Objek binaan yang meliputi: Perangkat Daerah, BUMD, Kelurahan, Sekolah, dan masyarakat
5. Kegiatan pembinaan yang meliputi: sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada objek binaan melalui media diskusi, tayang kearsipan (video, film, dll) dan media massa lainnya, Pendidikan dan pelatihan sebagai mekanisme pemberian dan peningkatan kemampuan dan pengakuan formal di bidang kearsipan serta bimbingan teknis sebagai upaya memberikan kemampuan teknis di lapangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya utama yang perlu diinformasikan dalam renstra ini antara lain sumber daya manusia yang ada pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, sarana prasarana pendukung yang dimiliki dan besarnya anggaran untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan yang ada, uraian berikut ini memberikan gambaran secara lebih rinci terkait sumber daya organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dalam hal sumber daya manusia dan sumber daya asset/modal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi akan diklasifikasi atas dasar jumlah personil untuk setiap kelompok fungsi yang terdapat pada bagian Sekretariat, Bidang Kearsipan, Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan, Bidang Pengembangan Perpustakaan, dan Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca, serta kelompok jabatan fungsional, selain itu kondisi sumber daya manusia dibedakan berdasarkan status, golongan/ruang serta tingkat pendidikan SDM.

Sumber daya manusia Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi berjumlah 52 orang, yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 33 perempuan, adapun komposisi dalam struktur organisasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Komposisi pegawai menurut kelompok fungsi

No.	Fungsi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala	1		1
2	Sekretariat	5	11	16
3	Bidang Kearsipan	4	5	9
4	Bidang Pengemb. Dan Informasi Kearsipan	2	5	7
5	Bidang Pengembangan Perpustakaan	4	6	10
6	Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca	3	6	9
JUMLAH		19	33	52

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2022

Dalam komposisi berdasarkan latar belakang pendidikan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi mempunyai pegawai dengan latar pendidikan S.2 sebanyak 14 orang, S.1 sebanyak 26 orang, D.3 6 orang, dan SMA 13 orang, yang rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
Komposisi pegawai menurut pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	-	-	-
2	S2	7	7	14
3	S1	8	18	26
4	D3	2	4	6
5	SMA	5	8	13
JUMLAH		22	37	52

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2022

Untuk komposisi berdasarkan golongan/ruang terdiri dari golongan IV sebanyak 13 orang, golongan III sebanyak 36 orang, golongan II sebanyak 13 orang dan tidak ada golongan I, yang rinciannya bisa dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Komposisi pegawai berdasarkan golongan/ruang

No	Golongan Ruang	a	b	c	d	Jumlah
1.	Golongan IV	10	2	1		13
2.	Golongan III	5	6	13	14	38
3.	Golongan II	-	-	3	4	7
4.	Golongan I	-	-	-	1	1
JUMLAH		15	8	17	19	52

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2022

Berdasarkan status kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki Pegawai Negeri Sipil sejumlah 59 orang dan Pegawai TTK sejumlah 17 orang, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5.
Komposisi pegawai menurut status kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil			
	- Jabatan Struktural	4	3	7
	- Jabatan Fungsional	4	14	27
	- Staf	7	13	18
Total		22	37	52
Pegawai TTK		6	10	16
Total		6	10	16
JUMLAH TOTAL		28	47	75

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2022

Secara kuantitas aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Disarpusda. Secara kualitas pun masih kurang memadai, aparatur yang ada masih perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan agar memahami tugas dan fungsinya dalam membantu tugas dinas.

2.2.2. Sumber Daya Asset/Modal

A. Sarana dan Prasarana

Apabila ditinjau dari sisi prasarana, sampai dengan tahun 2022 Disarpusda Kota Bekasi memiliki Gedung Layanan Perpustakaan Daerah dan kondisi gedung tersebut kurang representatif dan tidak sesuai dengan

Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Selain itu Disarpusda juga memiliki Depo Arsip yang merupakan gedung ex penampungan tenaga kerja wanita, sehingga bentuknya belum sesuai dengan standar nasional arsip. Ketersediaan kendaraan dinas berupa roda 4 dan roda 2 sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas karena fungsional melakukan pembinaan ke lapangan, berkoordinasi ataupun mengadakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan, namun ketersediaannya kendaraan masih terbatas. Berikut rincian asset/modal yang dimiliki Disarpusda sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Sarana dan Prasarana Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2022

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN					
NO	NAMA BARANG	BAIK	SEDANG	RUSAK	JUMLAH
A	GEDUNG				
1	Depo A	-	1	-	1
2	Depo B	-	1	-	1
3	Gudang A	-	1	-	1
4	Gudang B	-	1	-	1
5	Gedung Layanan Perpustakaan	-	1	-	1
B	KENDARAAN				
1	Sepeda Motor	9	1	-	10
2	Kendaraan Roda Empat	13	1	1	14
3	Kendaraan Mobil Keliling	2	-	-	1
4	Sepeda Motor Keliling	1	-	-	1
C	PERALATAN				
1	Filling Besi/Cabinet	48	-	-	48
2	Lemari Besi	10	-	-	10
3	Lemari Penyimpan	1	-	-	-
4	Roll O Pack Lufo	1	-	-	1
5	Rak Besi/Metal/Arsip	146	-	21	167
6	Rotary filling Roll opack ALBA	2	-	-	2
7	Lemari Kaca	10	-	-	10
8	KOLECER	4	-	-	4
9	Lemari Loker 12 Pintu	1	-	-	1
10	Lemari Sorok	4	-	-	4
11	Alat penghancur kertas	12	-	-	12
12	Lemari arsip dinamis	10	-	-	10
13	Papan visual	1	-	-	1
14	Papan Display	1	-	-	1
15	Layar Film	2	-	-	2
16	Angkutan barang trolley krisbow	2	-	-	2
17	Alat Pemadam Portable	13	-	-	13
18	Scanner	8	1	-	9
19	UPS	7	-	-	1

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN					
NO	NAMA BARANG	BAIK	SEDANG	RUSAK	JUMLAH
20	Pesawat Telephone Panasonic	1	-	-	1
21	Alat komunikasi lain-lain	1	-	-	1
22	Rak Kayu	86	-	-	86
23	PC Unit	41	-	2	43
24	Printer	38	8	-	46
25	Personal Komputer (Lenovo C Series)	1	-	-	1
26	Peralatan Komputer Mainframe (Hardware)	1	-	-	1
27	Camera dan Attachment Canon Ixus 115	1	-	-	1
28	Camera dan Attachment sony	1	-	-	1
29	Camera dan Attachment	3	-	-	3
30	Megaphone TOA	1	-	-	1
31	Microhone Wireles Mic	1	-	-	1
32	Proyektor + Attachment	4	1	1	6
33	Soundssystem portable Xelulont	1	-	-	1
34	Loudspeaker	2	-	-	2
35	Audio Moding Portable	2	-	-	2
36	Gerobak dorong	5	-	-	5
37	Lemari Kayu	7	-	-	7
38	Lemari Kayu Penyimpanan Buku Perpustakaan	41	-	-	41
39	Kursi	47	-	-	47
40	Meja rapat	4	-	-	5
41	Meja Tambahan	1	-	-	1
42	Sofa	8	-	-	8
43	Televisi	6	-	-	6
44	Sound system polytron Home Theatre	1	-	-	1
45	Laptop/Notebok	33	-	1	34
46	Camera dan Attachment Nikon D3200	1	-	-	1
47	Kursi besi rakuda	4	-	-	4
48	Meja panjang	6	-	-	6
49	Meja komputer brilliant (Merk lain)	4	-	-	7
50	Mahframe xeon	1	-	-	1
51	Hardisk external	10	-	-	10
52	Hardisk	2	-	-	2
53	Monitor	7	-	-	7
54	Router TP-Link	1	-	-	1
55	Modem	1	-	-	1
56	Camera elektronik CCTV	2	-	-	2
57	Mesin photo copy fuji xerox DC S 2420	1	-	-	1
58	Lemari buffet kayu	1	-	-	1
59	Kursi putar	6	-	-	6
60	Kursi Tangan	4	-	-	4

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN					
NO	NAMA BARANG	BAIK	SEDANG	RUSAK	JUMLAH
61	Handycam Toshiba	1	-	-	1
62	Display runnting text	1	-	-	1
63	Server	1	-	-	1
64	Rak peralatan	1	-	-	1
65	Switcer Combination	2	-	-	2
66	Peralatn Studio Visual lain-lain	1	-	-	1
67	Loudspeaker	4	-	-	4
68	Microphone	2	-	-	2
69	Stabilisator	1	-	-	1
70	Camera + attachment sony cybershoot	1	-	-	1
71	Power amplifier	1	-	-	1
72	Facsimilie	3	-	-	3
73	Papan Pengumuman	1	-	-	1
74	TV Layanan	1	-	-	1
75	Lemari Besi	1	-	-	1
76	Mesin absensi	3	-	-	3
77	Kipas Angin	2	-	-	2
78	Potable Generating Set	2	-	-	2
79	Stand Komputer	5	-	-	5

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2022

Berdasarkan tabel diatas, masih ada kebutuhan dalam asset/modal dalam hal ini pemeliharaan gedung depo arsip A dan depo arsip B dan gedung layanan perpustakaan yang harus segera direkondisi agar terjaganya arsip pemerintah kota Bekasi dan meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan, sedangkan kebutuhan rak arsip dan rak buku yang baru untuk menggantikan rak arsip dan buku yang rusak untuk segera dilaksanakan demi menunjang operasional tatalaksana kearsipan di LKD dan layanan perpustakaan.

Tabel 2.9.
Volume arsip Urusan Kearsipan

NO	JENIS ARSIP	JUMLAH	KETERANGAN
1	Arsip Dinamis In Aktif dengan masa retensi 7 tahun	8.062 Boks Depo A : 3.153Boks Depo B : 2.353 Boks Depo C : 2.256 Boks	Data Tahun2019 1.170 Boks telah selesai di kelola
2	Arsip Statis pada Depo Arsip	278 Boks	

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2022

Tabel 2.10.

Jumlah Koleksi Buku Urusan Perpustakaan

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH JUDUL	JUMLAH EXEMPLAR
1	LAYANAN UMUM	8.648	17.638
2	LAYANAN PAKET	3.094	15.470
3	LAYANAN PUSLING	3.295	9.275
4	HIBAH 34 KELURAHAN, 12 KECAMATAN DAN 8 PD	21.175	83.055
TOTAL		36.212	125.438

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2022

B. Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi

Dalam menunjang pelayanan kearsipan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi didukung sistem yang didasarkan atas Teknologi Informasi yang bisa dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.11.

Data sistem Informasi Dinas Arsip dan Perpustakaan

No.	Nama	Uraian	Keterangan
1	SRIKANDI	Pelayanan Kearsipan Dinamis	Proses pengembangan
2	SIKD	Pelayanan Kearsipan Dinamis	Di non aktifkan dari ANRI
3	INLISLite	Pelayanan Informasi Perpustakaan	Aktif

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2022

Aplikasi Srikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam aplikasi Srikandi, setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Aplikasi Srikandi memiliki beberapa fitur utama. Pertama, fitur penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar-instansi pemerintah. Kedua, terdapat fitur pemeliharaan arsip untuk menjaganya agar tetap autentik, utuh, dan terpercaya. Di dalam aplikasi ini juga terdapat fitur penggunaan arsip oleh yang berhak, serta fitur penyusutan arsip yang meliputi pemindahan dan pemusnahan arsip. Penggunaan aplikasi Srikandi sebagai aplikasi umum instansi pemerintah dinilai sebagai bentuk peningkatan kualitas dalam bidang kearsipan. Hal ini dikarenakan setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan

baik sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Dengan aplikasi ini, arsip yang tercipta dan dikelola dalam SPBE akan lebih optimal dalam melindungi kepentingan hak keperdataan rakyat

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang merupakan salah satu pendukung dalam akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan harus segera diimplementasikan pada seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Bekasi, dalam hal SIKD, Dinas Arsip dan Perpustakaan telah menerima bantuan dari ANRI dalam bentuk server SIKD untuk mendukung implementasi pada Pemerintah Kota Bekasi.

INLIS Lite merupakan perangkat lunak (software) aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sejak tahun 2011 untuk kepentingan pembangunan pangkalan data Katalog Induk Nasional (Union Catalog) yang lengkap dan dapat diakses melalui internet secara cepat dan mudah oleh pengguna perpustakaan di manapun. Selain itu Inlislite juga dikembangkan sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan sekaligus mengembangkan perpustakaan digital / mengelola dan melayankan koleksi digital.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Disarpusda Kota Bekasi dalam Bab ini diukur berdasarkan capaian kinerja Renstra periode sebelumnya dari Disarpusda Tahun 2018-2023 melalui tingkat pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran.

Dalam Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 terdapat 2 (dua) sasaran strategis harus dicapai oleh Disarpusda Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel di bawah berikut.

Tabel 2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2019 - 2023

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					
			2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	N/A	BB 78	BB 79	A 80	A 81	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	74	75	76	77
									2	Nilai AKIP	N/A	BB 78	BB 79	A 80	A 81
2	Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	N/A	63	65	70	75	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	3	Indeks Pengawasan Kearsipan	B 63	B 64	B 65	B 70	B 75
3	Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	56	58	60	63	66	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi	4	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	56	58	60	63	66

Gambaran capaian kinerja Disarpusda Kota Bekasi dalam Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2018-2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Renstra PD				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	Nilai	N/A	BB 78	BB 79	A 80	A 81	N/A	78.10	79.17	79.99	55.01
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	74	75	76	77	N/A	77.43	76.56	82.8	81.17
		Nilai AKIP	Nilai	N/A	BB 78	BB 79	A 80	A 81	N/A	78.10	79.17	79.99	55.01
2	Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	Persentase	N/A	63	65	70	75	N/A		75	75	75
2.1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	Indeks	B 63	B 64	B 65	B 70	B 75	N/A	B 62.85	B 69.41	B 68.39	A 83.29
3	Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks	56	58	60	63	66	N/A	58.19	58.84	60.54	62.59
3.1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks	56	58	60	63	66	N/A	58.19	58.84	60.54	62.59

Sumber : Data diolah Sub Bagian Perencanaan Disarpusda Kota Bekasi, 2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Disarpusda pada tahun 2020-2021 belum berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan karena kondisi pada saat itu ada pandemi covid-19 yang mengakibatkan anggaran Disarpusda di refocusing untuk penanganan covid-19. Selain itu adanya pandemi covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada pertengahan Bulan Maret 2020, semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat dibatasi, sekolah ditutup dan masyarakat dianjurkan membatasi mobilitas keluar rumah untuk mencegah penyebaran penyakit menyebabkan berkurangnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Perpustakaan Kota Bekasi belum memiliki fasilitas perpustakaan digital, masyarakat harus datang langsung untuk menikmati pelayanan perpustakaan.

Dengan keterbatasan anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah tetap berupaya untuk mencapai sasaran meningkatkan minat baca masyarakat. Beberapa gerakan masif telah dilakukan seperti dengan berkerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan pembinaan untuk pengelola perpustakaan dan pustakawan mendatangi langsung ke perpustakaan-perpustakaan sekolah dan masyarakat melakukan pembinaan sebagai salah satu upaya mencapai indikator program persentase perpustakaan yang aktif dan Persentase perpustakaan yang terintegrasi sistem perpustakaan. Sedangkan pencapaian untuk persentase peningkatan jumlah pengunjung sangat rendah disebabkan karena beberapa kegiatan yang semula direncanakan dilaksanakan di perpustakaan batal pelaksanaannya serta kurangnya kunjungan perpustakaan keliling karena adanya pandemic covid 19.

Dalam mencapai target sasaran tersebut, pada tahun 2019-2020 Disarpusda melaksanakan 7 (tujuh) program mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perpustakaan
2. Program Pembudayaan Gemar Membaca
3. Program Penyelenggaraan Kearsipan
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sedangkan Tahun 2021-2023 Disarpusda melaksanakan 4 (empat) Program mengacu pada RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pengelolaan Kearsipan
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Tantangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dalam urusan kearsipan diantaranya :

1. Perkembangan teknologi

Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, Arsiparis memiliki tantangan dalam pengelolaan arsip di masa mendatang, diantaranya arsip-arsip yang tercipta akan mengarah pada arsip berbasis teknologi digital dan cloud computing.

2. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan penyediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sudah waktunya untuk bertransformasi melalui pemanfaatan kemajuan TIK digunakan sebagai sarana dalam rangka menciptakan e-arsip melalui penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis maupun penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis yang terintegrasi dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

3. Persepsi yang salah terhadap arsip

Selama ini, terdapat anggapan bahwa arsip merupakan limbah administrasi yang tidak berharga sehingga tidak dikelola secara khusus. Anggapan ini semakin parah manakala para pimpinan instansi tidak memahami tentang peran dan fungsi arsip sebagai bahan bukti pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan.

4. Kurangnya SDM Kearsipan

Salah satu penyebab hambatan dalam penyelenggaraan kearsipan dewasa ini di instansi pemerintah karena disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia kearsipan yang profesional, yaitu arsiparis. Berdasarkan data di lapangan, tidak semua instansi memiliki arsiparis untuk melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Sehingga tak heran, apabila kondisi kearsipan di instansi tersebut kurang baik.

5. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Secara umum, permasalahan yang timbul dalam sarana dan prasarana kearsipan adalah banyaknya instansi pemerintah yang belum membangun atau menunjuk tempat khusus yang representatif sebagai tempat penyimpanan dan pengamanan arsip. Padahal sebagaimana diketahui, setiap lembaran arsip itu merupakan rekaman kegiatan yang kelak dapat dijadikan sebagai bahan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintahan yang harus diselamatkan keberadaannya. Dengan adanya depo atau tempat penyimpanan arsip yang representatif, maka arsip-arsip yang ada didalamnya dapat terjaga sehingga informasi yang terdapat didalam arsip dapat dijaga dari orang-orang yang tidak berhak mengetahuinya.

Dalam urusan perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai beberapa tantangan yaitu :

1. Memasuki era digitalisasi atau memasuki revolusi industri 4.0 yaitu suatu kondisi pemanfaatan kemajuan teknologi digital yang canggih, dan masyarakat sudah saling terkait dengan adanya kemajuan teknologi digital tersebut. Pemberdayaan Kegemaran Membaca (PKM) melalui gerakan gemar membaca pada masyarakat, keluarga, dan satuan pendidikan sudah saatnya memanfaatkan kemajuan teknologi digital tersebut;
2. Pada masa sebelumnya, perpustakaan tumbuh menjadi pusat informasi yang menyediakan pengetahuan bagi masyarakat, namun untuk saat ini dan kedepan perpustakaan telah bertransformasi, tidak hanya menyediakan pengetahuan tapi juga mengubah masyarakat melalui upaya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pengelolaan perpustakaan agar dirancang memiliki nilai kebermanfaatannya yang tinggi untuk masyarakat, dan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
3. Tantangan paling berat untuk Disarpusda yaitu mempersiapkan sumber daya manusia perpustakaan yang menguasai kemajuan teknologi digital, dan peningkatan fasilitas membaca yang berbasis teknologi digital guna mempermudah akses masyarakat terhadap perpustakaan, selain itu memperkuat kerjasama dengan stakeholder.

2.4.2. Peluang

Dalam kearsipan, khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, terdapat beberapa peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan kearsipan. Peluang merupakan modal yang menjadi faktor pendorong bagi keberhasilan pekerjaan. Ada beberapa peluang

yang dapat dijadikan modal berharga sekaligus pendorong bagi keberhasilan pekerjaan di bidang kearsipan. Peluang-peluang itu sebagai berikut :

1. Adanya Landasan Hukum Kearsipan

Dalam penyelenggaraan kearsipan, terdapat payung hukum pelaksanaan kearsipan, baik yang diterbitkan oleh tingkat pusat maupun Daerah (provinsi maupun kota). Produk peraturan kearsipan tingkat pusat antara lain : Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012, Perka ANRI tentang pengaturan teknis dan lain-lain. Sedangkan produk peraturan kearsipan Daerah (Provinsi) antara lain : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang JRA Kepegawaian dan Keuangan, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2012 tentang JRA Substantif dan Fasilitatif, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Gubernur Jawa Barat.

2. Adanya Lembaga Kearsipan

Di Kota Bekasi, telah dibentuk Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DISARPUSDA) yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Kota di bidang kearsipan. Sedangkan pada setiap Perangkat Daerah, dibentuk Unit Kearsipan instansi yang berada di Sekretariat/Bagian Umum. Hubungan yang terjalin antara Disarpusda dengan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kearsipan cukup erat. Hal itu dikarenakan bahwa Disarpusda sesuai dengan salah satu fungsinya bertugas melakukan pembinaan yang meliputi bimbingan, pelatihan, fasilitasi, arahan dan supervisi ke perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

3. Adanya SDM/Tenaga Teknis Profesional Kearsipan

Tenaga kerja yang bekerja di bidang kearsipan telah diakui sebagai professional, yaitu Arsiparis yang merupakan jabatan fungsional. Kepada mereka disediakan peraturan khusus tentang jenjang karir dan tunjangan fungsional. Dengan demikian mereka ini telah memiliki jalur pengembangan karier yang pasti. Untuk mengatur jabatan fungsional arsiparis telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis. Dalam Permenpan ini diatur mengenai posisi, kedudukan dan status baru yang menyangkut jabatan fungsional arsiparis serta penghitungan dan penetapan angka kreditnya. Sedangkan untuk mencetak SDM kearsipan secara formal, pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri seperti Unpad, UGM, UI, Unhas dan lain-lain telah dibuka Program D III Kearsipan yang menghasilkan ahli madya di bidang kearsipan. Sementara melalui

jenjang kediklatan, PUSDIKLAT ANRI menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada para pegawai negeri sipil untuk menjadi jafung arsiparis.

Selanjutnya peluang yang ada pada urusan perpustakaan, yaitu

1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan semakin menguatkan keberadaan dan meningkatkan daya tawar lembaga perpustakaan.
2. Revolusi mental yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, perpustakaan berkontribusi dalam penguatan mentalitas budaya kemandirian, gotong royong dan pelayanan, sebab fungsi perpustakaan mendorong perubahan pola pikir dan pembentukan karakter melalui kebiasaan membaca.
3. Perpustakaan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, menyediakan beragam jenis sumber informasi baik cetak, tertulis maupun terekam yang jika dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat dapat menciptakan suatu tatanan masyarakat pembelajar.
4. Adanya peraturan yang mengamanatkan bahwa sekolah/madrasah mengalokasikan dana untuk perpustakaan sekolah paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal.
5. Adanya Gerakan Literasi Nasional yang merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antarunit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia.

Keseluruhan tantangan dari urusan kearsipan dan urusan perpustakaan akan menjadi permasalahan yang akan dicarikan solusi dan penyelesaiannya melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang seperti diatas, untuk 3 (tiga) tahun mendatang, Disarpusda Kota Bekasi perlu melakukan peningkatan kapasitas organisasi antara lain melalui :

1. Pemanfaatan dan penggunaan TIK sebagai sarana pelayanan;
2. Peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi penggunaan TIK;
3. Pemutakhiran standar operasional prosedur kerja;
4. Penguatan anggaran program dan kegiatan secara proporsional;
5. Penciptaan iklim budaya kerja yang terbuka, berintegritas; dan produktif;
6. Komitmen pimpinan dalam pencapaian tujuan, sasaran strategis, strategi, dan arah kebijakan organisasi.

2.5 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat: Pengguna Arsip, Pemustaka;
- b. Organisasi Perangkat Daerah Kota Bekasi, BUMD, Swasta, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Perguruan Tinggi, serta Instansi Pemerintah lainnya yang ada di Kota Bekasi.
- c. SDM Pengelola Kearsipan / Arsiparis dan SDM Pengelola Perpustakaan / Pustakawan
- d. Arsip Dinamis dan Arsip Statis;
- e. Semua Jenis Perpustakaan;
- f. Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan yang ada di Kota Bekasi
- g. Kecamatan dan Kelurahan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BEKASI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Disarpusda Kota Bekasi yang telah ditetapkan sebagai Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi:

TUGAS POKOK	FUNGSI
Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang kearsipan, pengembangan dan informasi kearsipan, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah; 2. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah; 3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bekasi; 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bekasi; 5. Penyelenggaraan fungsi lainnya sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Kompleksitas penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan pada era otonomi daerah sampai saat ini secara fundamental semakin meningkat, karena peran pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah akselerasinya harus dipercepat termasuk urusan perpustakaan dan urusan kearsipan.

Dalam rangka mempercepat akselerasi pelaksanaan kinerja urusan perpustakaan dan urusan kearsipan di daerah, sesuai dengan kondisi perkembangan kondisi kompleksitas penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, terdapat identifikasi permasalahan untuk melakukan pemetaan masalah.

Tabel 3.1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Urusan Wajib Disarpusda Kota Bekasi Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urusan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan umum daerah	IKK 2022	Prioritas pengadaan buku yang sesuai kebutuhan belum optimal	Peran serta penerbit belum optimal	Pemenuhan koleksi buku untuk kebutuhan pemustaka masih terbatas
	Tingkat Kegemaran Membaca	IKK 2022	Ketersediaan fasilitas membaca masih kurang sesuai standar	Kebiasaan membaca dan pemanfaatan perpustakaan masih kurang	Budaya gemar membaca belum terdapat peningkatan signifikan
	Pembangunan Literasi Masyarakat	IKK 2022	Pemerataan layanan perpustakaan masih kurang	Jangkauan wilayah layanan perpustakaan Kota Bekasi sangat Luas	Peningkatan Literasi Masyarakat Kota Bekasi masih rendah
Urusan Kearsipan	Pengelolaan arsip secara tertib	IKK 2022	Pengelolaan arsip dinamis oleh Perangkat Daerah belum baik	Pengawasan kearsipan belum efektif dan alokasi anggaran masih minim	Pengelolaan arsip dinamis belum tertib
	Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	IKK 2022	Pengelolaan arsip dinamis oleh perangkat daerah belum tertib	Komitmen Kepala Perangkat Daerah selaku penanggung jawab penciptaan arsip masih rendah	Ketersediaan arsip dinamis belum efektif

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	IKK 2022	Penyelamatan arsip kesejarahan belum efektif	Pemahaman stakeholder terhadap arsip yang bernilai kesejarahan masih rendah	Keberadaan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban nasional untuk simpul pemersatu bangsa khasanahnya masih rendah

Berdasarkan tabel 3.1.1 Identifikasi permasalahan layanan perangkat daerah diatas, terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat;
2. Pemenuhan koleksi buku untuk kebutuhan pemustaka masih terbatas;
3. Peningkatan literasi masyarakat Kota Bekasi masih cukup;
4. Pengelolaan arsip dinamis belum tertib;
5. Ketersediaan arsip dinamis belum efektif;
6. Keberadaan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban nasional untuk simpul pemersatu bangsa khasanahnya masih rendah.

Untuk mengidentifikasi permasalahan urusan perpustakaan dan kearsipan maka sangat diperlukan peta masalah yang akan menguraikan secara lebih terperinci, dibawah ini disampaikan tabel peta masalah urusan perpustakaan dan kearsipan berkaitan dengan isu strategis sebagai berikut :

Identifikasi permasalahan pada perangkat daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Dinas Arsip

dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

No	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1.	Budaya kegemaran membaca masyarakat belum terdapat peningkatan yang signifikan	Daya tarik perpustakaan belum tinggi	Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Bekasi b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi c. Kompetensi fungsional pustakawan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi masih perlu ditingkatkan. d. Belum optimalnya kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan kecamatan, perpustakaan kelurahan, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan masyarakat, e. Tingkat ketercukupan koleksi buku yang terbaru dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masih kurang. f. Masih banyaknya perpustakaan yang belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan
2.	Ketersediaan dan keberadaan arsip autentik dan bernilai kesejahteraan belum efektif	Pengelolaan arsip dinamis belum efektif	Komitmen Kepala Perangkat Daerah selaku penanggung jawab penciptaan arsip masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> a. perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib masih kurang. b. Kompetensi fungsional arsiparis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi masih perlu ditingkatkan c. Belum optimalnya sumber daya manusia dalam kualifikasi bidang kearsipan, tidak adanya penunjukkan tugas pengelola kearsipan/arsiparis, disiplin pengelolaan kearsipan dan kreatifitas d. Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan kearsipan secara tertib dan berbasis elektronik pada depo arsip dan perangkat daerah masih kurang

3.2. Telaahan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bekasi

Dinas Arsip dan Perpustakaan yang merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang membantu pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dituju. Urusan Kearsipan mengacu kepada penanganan Isu Strategis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu “Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Layanan Publik” dengan tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel” dan Sasarannya “Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah” Sedangkan Urusan Perpustakaan mengacu kepada penanganan Isu Strategis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu : “Mewujudkan Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” dengan Tujuan “Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara berkeadilan”, dan Sasaran “Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi”.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi maka ditentukanlah tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi sebagai berikut Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam urusan kearsipan dan urusan perpustakaan, yaitu :

Tabel 3.2.1
Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bekasi
Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

Isu Strategis : Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Layanan Publik			
Tujuan RPD	Sasaran RPD	Strategi RPD	Arah Kebijakan RPD
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	Menerapkan teknologi/ Transformasi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat	Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital
Isu Strategis RPD : Mewujudkan Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan RPD	Sasaran RPD	Strategi RPD	Arah Kebijakan RPD

Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berualitas secara berkeadilan	Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi	Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan secara merata dan terjangkau seluruh kalangan	Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata
---	--	---	--

Sejalan dengan isu strategis, tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, maka rumusan faktor penghambat dan pendorong pelayanan Disarpusda dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Disarpusda

Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

No	Tujuan, Sasaran dan Program RPD	Permasalahan Pelayanan Disarpusda Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel				
1	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	Ketersediaan dan keberadaan arsip autentik dan bernilai kesejarahan belum efektif	Pengelolaan arsip dinamis belum tertib	Urusan Kearsipan telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari agenda Pembangunan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan serta agenda memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
a	Program Pengelolaan arsip			
b	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Penyelamatan arsip kesejarahan belum efektif	
Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara berkeadilan				
2	Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi	Budaya kegemaran membaca masyarakat belum terdapat peningkatan yang signifikan	Daya tarik perpustakaan belum tinggi	Urusan Perpustakaan telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai prioritas nasional sebagai bagian penting budaya
a	Program Pembinaan Perpustakaan			

				literasi dalam indeks pembangunan kebudayaan
--	--	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra Lembaga Kearsipan Nasional (ANRI), Perpustakaan Nasional RI (PNRI) dan DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat

Disarpusda Kota Bekasi dibentuk berdasarkan penggabungan perangkat daerah yang didasarkan perumpunan urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan. Dan secara kelembagaan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan memiliki instansi pembina tingkat nasional yaitu Perpustakaan Nasional (Perpusnas RI) dan Arsip Nasional RI (ANRI). Oleh karena itu dalam melakukan telaahan selanjutnya diperlukan analisis terhadap 2 (dua) kategori urusan pemerintahan berkaitan dengan PERPUSNAS RI serta ANRI.

Tabel 3.2.4
Permasalahan Pelayanan Disarpusda Kota Bekasi
Berdasarkan Sasaran renstra K/L beserta faktor penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Disarpusda Kota Bekasi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Rencana Strategis Arsip Nasional RI Tahun 2020-2024				
1	Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan ditandai dengan meningkatnya kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat peraturan perundang-undangan bidang kearsipan	Ketersediaan dan keberadaan arsip autentik dan bernilai kesejarahan belum efektif	Pengelolaan arsip dinamis belum tertib	Urusan Kearsipan telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari agenda Pembangunan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan serta agenda memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional ditandai dengan meningkatnya ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan			
3	Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan arsip informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan		Penyelamatan arsip kesejarahan belum efektif	
Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024				

2	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca	Budaya kegemaran membaca masyarakat belum terdapat peningkatan yang signifikan	Daya tarik perpustakaan belum tinggi	Urusan Perpustakaan telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai prioritas nasional sebagai bagian penting budaya literasi dalam indeks pembangunan kebudayaan
---	--	--	--------------------------------------	--

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Sejalan dengan RPD dimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai apabila dilihat dari kewenangan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Disarpusda Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, akan sangat berkepentingan, berkolaborasi dalam rangka mencapai target sasaran yaitu Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, salah satu faktor penting dalam prosesnya adalah akses perpustakaan yang dapat meningkatkan minat baca masyarakat, dan pada tahap selanjutnya akan mampu mewujudkan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di wilayah.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.

Penentuan isu strategis dikaitkan dengan telaahan identifikasi permasalahan urusan pemerintahan wajib Disarpusda Kota Bekasi, telaahan tujuan, sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terdapat isu strategis urusan perpustakaan dan urusan kearsipan yaitu :

1. Minat baca masyarakat masih rendah sebagai isu strategis untuk urusan perpustakaan;
2. Ketersediaan arsip autentik dan arsip bernilai kesejarahan masih rendah sebagai isu strategis urusan kearsipan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Arsip dan Perpustakaan

Penentuan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Arsip dan Perpustakaan didasarkan atas Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Bekasi 2024-2026. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi sebagai salah satu perangkat daerah dalam Pemerintah Kota Bekasi berpedoman pada RPD Pemerintah Kota Bekasi 2024–2026 dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan kewenangan dalam tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi merupakan arah dan pandangan ke depan dalam membantu menyelesaikan isu strategis Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi tantangan masa depan, yang memuat cita-cita yang ingin diwujudkan sehingga dapat berkarya secara kreatif, inovatif, produktif dan konsisten pada pertumbuhan (*suistanable growth*).

Berdasarkan rekomendasi strategis yang merupakan hasil analisis isu-isu strategis, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada tiga tahun mendatang, yaitu :

1. **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja”** dengan indikator tujuan **“Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Disarpusda”** dengan Sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja”** dengan indikator sasaran **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai AKIP Disarpusda**

Dalam rangka mendukung terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kota Bekasi dengan memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan pada Disarpusda. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan daerah. Kualitas tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu perangkat daerah, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan di Kota Bekasi.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Disarpusda merupakan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja pada semester 2 tahun n-1 dan semester 1 tahun berjalan Disarpusda.

Untuk nilai IKM diperoleh melalui survey dari pengguna pelayanan yang diberikan oleh Disarpusda yaitu pelayanan kearsipan dan pelayanan perpustakaan. Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang secara substantive menjelaskan unsur Survei Kepuasan Masyarakat. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan 9 (Sembilan) unsur penting, yang menjadi indikator baru dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun ke 9 (Sembilan) unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan atau dibutuhkan oleh aparat atau penyedia layanan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki

oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2. “Terwujudnya Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi” dengan indikator tujuan “Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja” dengan sasaran “Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan” dengan indikator sasaran “Indeks Pengawasan Kearsipan”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan salah satu tujuan dari penyelenggaraan kearsipan adalah menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Bekasi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kearsipan lingkup Pemerintah Kota Bekasi sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Nilai tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja diperoleh dari Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik, Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

Nilai ini merupakan salah satu indikator kinerja kunci urusan kearsipan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bekasi.

Penyelenggaraan kearsipan harus sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten/kota merupakan tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilakukan dengan audit kearsipan dan monitoring melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

3. **“Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bekasi”** dengan indikator tujuan **“Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bekasi”** dengan sasaran **“Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat”** dengan indikator sasaran **“Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat”**

Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk *cognitive skill* memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Berbagai data hasil penelitian umumnya masih menunjukkan bahwa minat dan kebiasaan masyarakat Indonesia masih cukup rendah. Rendahnya minat dan kebiasaan membaca tersebut dapat dipengaruhi pada beberapa faktor

seperti keterbatasan sarana dan prasarana membaca, rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah dan wakil rakyat, serta berbagai faktor lainnya.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang perpustakaan salah satunya yakni Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). IPLM merupakan pengukuran nilai indeks yang digunakan untuk memformulasikan kebijakan pembangunan bidang perpustakaan, serta digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia. Sehingga diperlukan adanya ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan baik pada aspek koleksi, tenaga pengelola, sarana dan prasarana, hingga pelayanan pada pemustaka dan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan literasi di perpustakaan. Ketersediaan dan penyelenggaraan perpustakaan diyakini mampu berkontribusi pada upaya pembangunan literasi masyarakatnya. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) terdiri dari 7 (tujuh) Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM). Adapun ketujuh unsur tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM)
(Sumber : Perpustnas RI, 2021)

Untuk mengetahui ukuran IPLM, digunakan formula rumus yang berlaku secara nasional, yaitu :

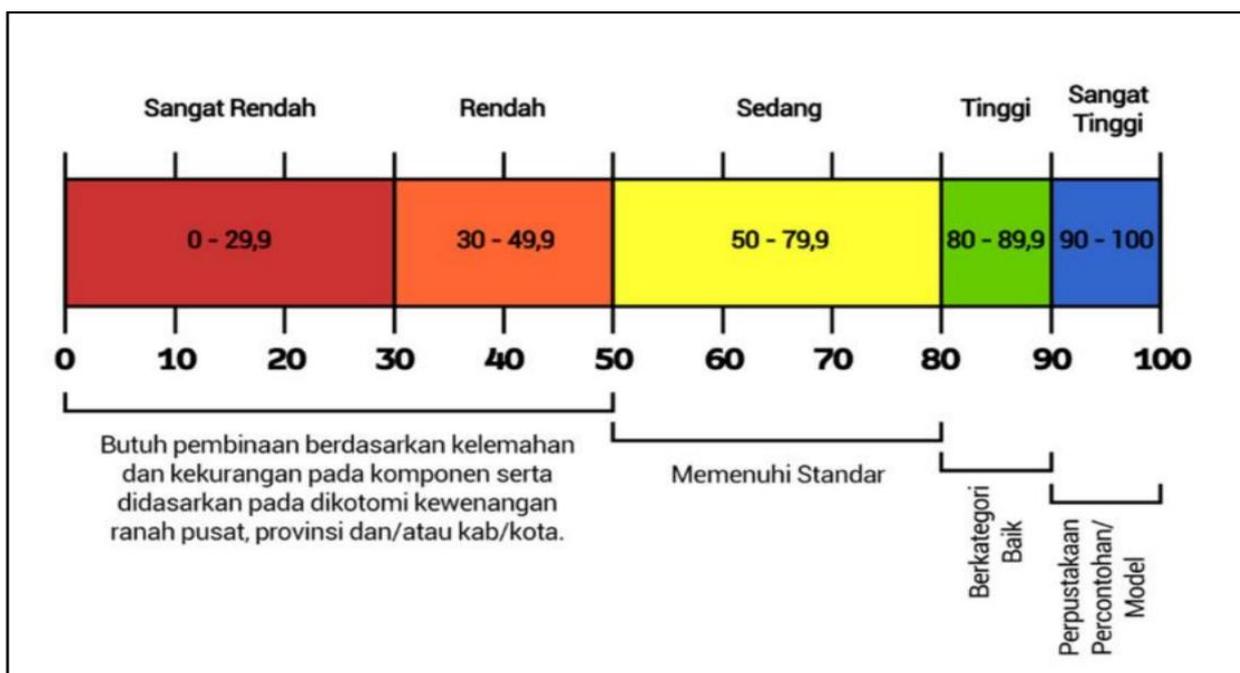
$$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$$

Keterangan:

- UPLM_i : Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat
- AM : Jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan.

Simbol AM pada rumus di atas merupakan angka yang menggambarkan Aspek Masyarakat, yang jika didefinisikan yaitu jumlah penduduk (populasi)

wilayah setempat, sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah masing-masing, dalam kajian ini adalah dari BPS Kota Bekasi. Angka masyarakat ini memperhatikan angka pembagi rasio wilayah kota dan angka koreksi berdasarkan tingkat kepadatan penduduk yang ada di Kota Bekasi. Pengukuran skor dalam kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menggunakan skala level 100 dengan tingkatan skor seperti tergambar sebagai berikut.



Salah satu tujuan pengukuran IPLM adalah diperolehnya dukungan pemerataan dan pengembangan sarana/prasarana infrastruktur serta peningkatan strategi layanan perpustakaan, karena itu tinggi rendahnya kategori IPLM yang dicapai oleh setiap daerah dapat menjadi dasar/acuan dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu layanan perpustakaan di daerah masing-masing. Strategi pengembangan perpustakaan dapat disesuaikan dengan setiap angka UPLM yang telah dicapai serta mengacu pada standar nasional perpustakaan.

Dengan terbangunnya infrastruktur perpustakaan serta unsur-unsur pembangun literasi di perpustakaan seperti pustakawan dan tenaga perpustakaan, koleksi, kunjungan pemustaka, serta pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosialisasi maupun kegiatan literasi masyarakat. Pembangunan pada setiap unsur tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan literasi masyarakat di seluruh Indonesia, melalui pemerataan pembangunan dan pengembangan perpustakaan.

Terkait dengan perumusan tujuan dan sasaran diatas diindikasikan dan diintegrasikan dalam tabel 4.1, berikut ini :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-			SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-			
		2024	2025	2026			2024	2025	2026	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	80	80.5	81	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82
						2	Nilai AKIP	80	80.5	81
Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	76	77	78	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	3	Indeks Pengawasan Kearsipan	62	63	64
Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	41	42	43	Meningkatkan pembangunan literasi Masyarakat	4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	53	54	55

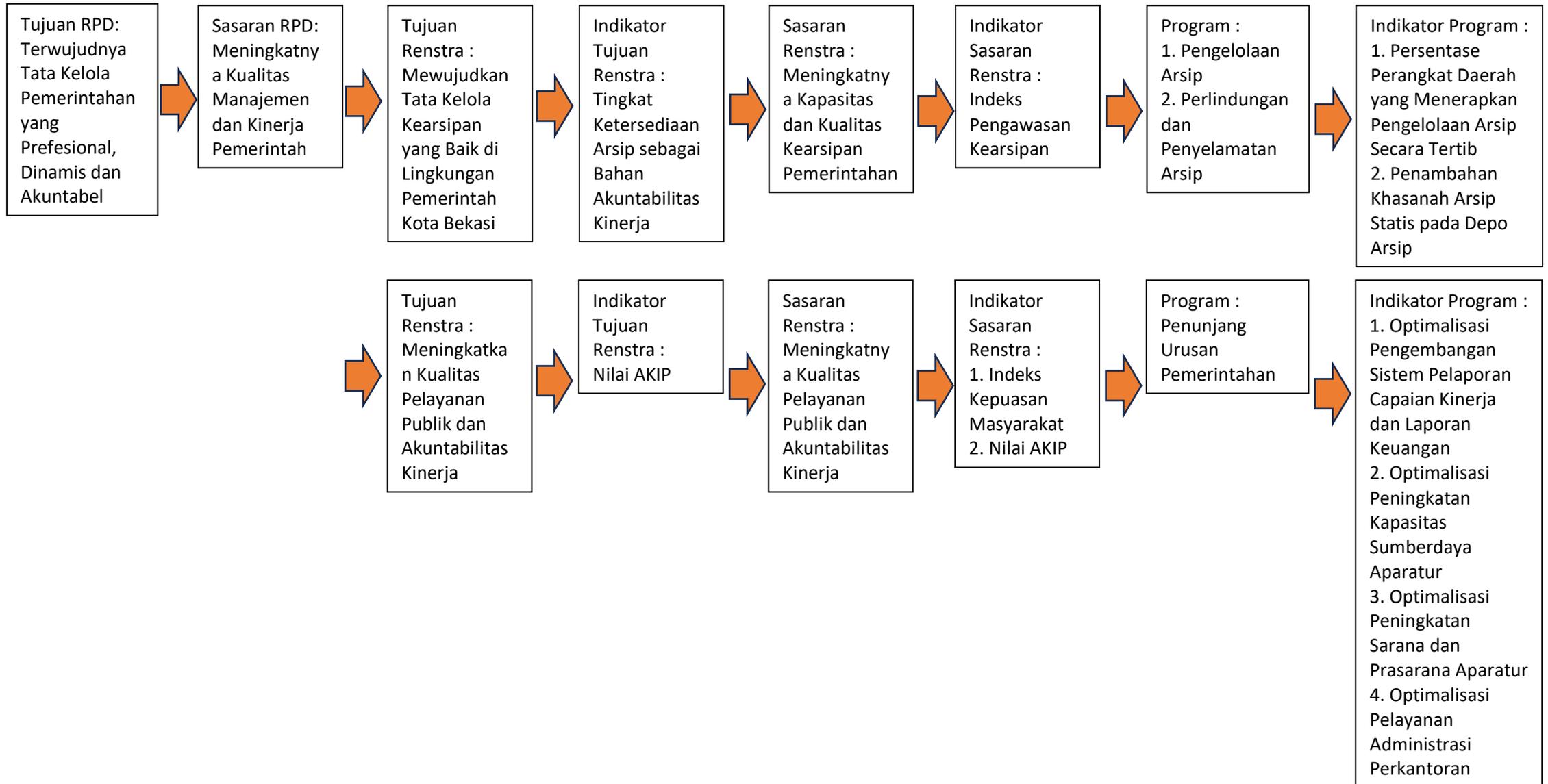
Ditinjau dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2025, Urusan Kearsipan mendukung pencapaian penanganan Isu Strategis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu “Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Layanan Publik” dengan tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel” dan Sasarannya “Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah” Sedangkan Urusan Perpustakaan mendukung pencapaian penanganan Isu Strategis Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu : “Mewujudkan Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” dengan Tujuan “Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara berkeadilan”, dan Sasaran “Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi”.

Berikut digambarkan alur cascading dari mulai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang terkait Disarpusda sampai pada program beserta indikator yang dilaksanakan oleh Disarpusda.

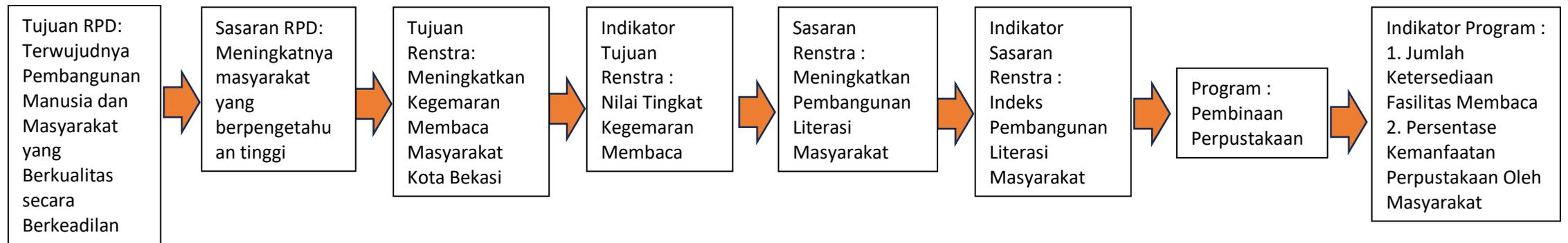
Tabel 4.2

Cascading RPD Kota Bekasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Tahun 2024-2026



Lanjutan....



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi tahun 2024-2025, diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program prioritas untuk mewujudkan sasaran pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Strategi dalam RENSTRA Disarpusda adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Disarpusda yang selaras dengan strategi daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPD 2024-2026. Selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Disarpusda sesuai program prioritas RPD 2024-2026 yang menjadi tugas dan fungsi Disarpusda.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Disarpusda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran pemerintah Kota Bekasi 2024-2026, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi telah menyusun tujuan, sasaran beserta indikator untuk mengukur pencapaiannya beserta strategi dan arah kebijakannya sebagai berikut :

a. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Umum

Dinas Arsip dan Perpustakaan menentukan tujuan Renstra urusan penunjang urusan pemerintahan umum yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja”** dengan indikator tujuannya yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Disarpusda. Dalam mewujudkan hal tersebut Disarpusda melakukan upaya untuk

mencapai sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja”** dengan indikator sasarannya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai AKIP yang didukung **“Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”** dengan indikator program yaitu Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan, Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b. Urusan kearsipan

Dinas Arsip dan Perpustakaan menentukan tujuan Renstra urusan kearsipan yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi”**, dalam mewujudkan hal tersebut Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi berusaha untuk mencapai sasaran **“Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan”** dimana pada masa sekarang ini pencapaian efisiensi dan efektivitas dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi, dimana hal ini sudah merambah pada pengelolaan kearsipan, oleh sebab itu dalam pencapaian sasaran tersebut maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi menentukan strategi-strategi terkait urusan kearsipan yang meliputi:

- 1) Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola kearsipan;
- 2) Peningkatan sarana dan Prasarana kearsipan
- 3) Penerapan sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD)
- 4) Penerapan Sistem informasi kearsipan statis (SIKS)
- 5) Pelayanan kearsipan berbasis teknologi informasi

Untuk melaksanakan strategi tersebut Dinas Arsip dan Perpustakaan menentukan arah kebijakan dalam urusan kearsipan dengan melakukan peningkatan kompetensi pengolahan arsip pada sumber daya manusia pengelola kearsipan/arsiparis, penyediaan sarana prasarana penyimpanan fisik arsip baik di lembaga kearsipan daerah/Dinas Arsip dan Perpustakaan maupun perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya melakukan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan arsip berbasis teknologi informasi dengan cara digitalisasi arsip dan peningkatan

kapasitas SIMKAR, yang pada akhirnya terjadi integrasi sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) perangkat daerah, sistem kearsipan statis (SIKS) Lembaga Kearsipan Daerah/Dinas Arsip dan Perpustakaan pada sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).

c. Urusan Perpustakaan

Dinas Arsip dan Perpustakaan menentukan tujuan Renstra urusan perpustakaan yaitu **“Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bekasi”**, dalam mewujudkan hal tersebut Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi berusaha untuk mencapai sasaran **“Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi”** Dinas Arsip dan Perpustakaan menentukan strategi (1). Peningkatan kualitas dan sarana prasarana penunjang pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui ketersediaan akses terhadap informasi terapan dan ilmu pengetahuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat; (2). Pembudayaan kegemaran membaca melalui tiga pilar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat., dengan melakukan kebijakan membangun gedung perpustakaan Kota Bekasi yang representatif, meningkatkan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan, memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung layanan perpustakaan, meningkatkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, membangun resource sharing antar perpustakaan di Kota Bekasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pustakawan

Dengan tetap mengacu pada strategi dan arah kebijakan RPD Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2024-2026

Isu Strategis RPD : Pemerintah Dinamis dan Transformasi Layanan Publik			
Tujuan RPD	Sasaran RPD	Strategi RPD	Arah Kebijakan RPD

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	Menerapkan teknologi/ Transformasi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat	Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Disarpusda	1 Peningkatan kompetensi aparatur Disarpusda 2 Penerapan SOP pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan 3 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah	1 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 2 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kearsipan 3 Penerapan SIKD 4 Penerapan SIKS 5 Pelayanan Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi	1 Peningkatan Kompetensi Pengolahan Arsip 2 Penyediaan sarana prasarana penyimpanan fisik arsip LKD dan PD 3 Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan Arsip berbasis teknologi Informasi 4 Integrasi SIKD LKD dan PD 5 Digitalisasi Arsip 6 Peningkatan Kapasitas SRIKANDI 7 Integrasi SIKS, SIKN dan JIKN
Isu Strategis RPD : Mewujudkan Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
Tujuan RPD	Sasaran RPD	Strategi RPD	Arah Kebijakan RPD
Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berualitas secara berkeadilan	Meningkatnya masyarakat yang berpendidikan tinggi	Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan secara merata dan terjangkau seluruh kalangan	Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kegemaran Membaca masyarakat Kota Bekasi	Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat	1 Peningkatan kualitas dan sarana prasarana penunjang pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui ketersediaan akses terhadap informasi terapan dan ilmu pengetahuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat	<p>1 Pembangunan gedung perpustakaan yang representatif di sekolah dan tempat publik lainnya sebagai sarana ruang belajar masyarakat</p> <p>2 Meningkatkan pemberdayaan perpustakaan dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat</p> <p>3 Menambah kuantitas dan kualitas pengelola perpustakaan agar profesional dan terampil</p> <p>4 Menambah keanekaragaman koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>5 Optimalisasi pemanfaatan IT dalam pelayanan perpustakaan</p> <p>6 Pengintegrasian sistem layanan perpustakaan se-Kota Bekasi</p> <p>7 Menambah jumlah prasarana penunjang perpustakaan guna memberikan pelayanan perpustakaan yang prima</p> <p>8 Membangun sinergitas perpustakaan SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan tinggi serta Taman Baca Masyarakat</p>

		<p>2 Pembudayaan kegemaran membaca melalui tiga pilar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat</p>	<p>1 Peningkatan peran keluarga, komunitas dan pegiat literasi dalam pembudayaan kegemaran membaca</p> <p>2 Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca di masyarakat melalui sosialisasi melalui penyuluhan</p> <p>3 Pemberian penghargaan bagi pegiat literasi yang membantu pembudayaan kegemaran membaca</p> <p>4 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembudayaan kegemaran membaca</p> <p>5 Pemanfaatan anggaran dana kelurahan untuk pengembangan perpustakaan kelurahan dan taman baca masyarakat</p>
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerahi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

- 1) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
- 2) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota

3) Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

4) Pencarian Arsip Statis kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

4. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2) Pembudayaan Kegemaran Membaca

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi setiap tahunnya dari Tahun 2024- 2026 secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI				
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
URUSAN KEARSIPAN																				
Mewujudka n Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi				Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja		75%	76%		77%		78%		78%		Kepala Disarpus da	Kota Bekasi				
	Meningkatny a kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintah n			Indeks Pengawasan Kearsipan		59	62		63		64		64		Kepala Disarpus da	Kota Bekasi				
		2.24.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah, dan lembaga/ BUMD yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib	%	22.72% 10 OPD	36.36% 16 OPD + 1 lembaga/B UMD	1,970,000,0 00	45.45% 20 OPD + 2 lembaga / BUMD	2,450,000,00 0	56.81% 25 OPD + 3 Lembag a/ BUMD	2,630,000,000	56.81 % 25 OPD			Kota Bekasi				
		2.24.0 2.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota																	
		2.24.0 2.2.01 .01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	500	1000 (2 OPD)	200,000,000	1500 (3 OPD)	250,000,000	2000 (4 OPD)	300,000,000				Kota Bekasi				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.24.0 2.2.01 .02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	150	350	300,000,000	450	350,000,000	550	400,000,000				Kota Bekasi
		2.24.0 2.2.01 .03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		2 dokumen	120,000,000	2 dokumen	150,000,000	2 dokum en	180,000,000				Kota Bekasi
		2.24.0 2.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota													
		2.24.0 2.2.02 .02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip		20	450,000,000	20	500,000,000	20	550,000,000				Kota Bekasi
		2.24.0 2.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota													
		2.24.0 2.2.03 .01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Penggun a		50	500,000,000	75	700,000,000	100	600,000,000				Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.24.0 2.2.03 .02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		2 Laporan	400,000,000	2 Laporan	500,000,000	2 Lapora n	600,000,000				Kota Bekasi
		2.24.0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Penambahan khasanah arsip statis pada depo arsip	Boks	278 Boks	322 Boks	800,000,000	366 Boks	500,000,000	410 Boks	550,000,000	410 Boks			Kota Bekasi
		2.24.0 3.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun													
		2.24.0 3.2.01 .01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip		350	300,000,000	450	350,000,000	550	400,000,000				Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.24.0 3.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota													
		2.24.0 3.2.02 .01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip		50 Arsip	350,000,000								Kota Bekasi
		2.24.0 3.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota													
		2.24.0 3.2.04 .01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip		10	50,000,000	15	50,000,000	20	50,000,000				Kota Bekasi
		2.24.0 3.2.04 .02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip		10	50,000,000	15	50,000,000	20	50,000,000				Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.24.0 3.2.05	Pencarian Arsip Statis kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang													
		2.24.0 3.2.05 .03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000			Kepala Bidang Kearsipan	Kota Bekasi
URUSAN PERPUSTAKAAN																
Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bekasi				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		40.01	41		42		43		43		Kepala Disarpus da	Kota Bekasi
	Meningkatkan Pembangunan Literasi masyarakat			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		52.14	53		54		55		55		Kepala Disarpus da	Kota Bekasi
		2.23.0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Membaca	Perpustakaan	1544	1556	2.000.000.000	1568	42.820.000.000	1580	3.270.000.000	1580		Kepala Bidang PKPKBP	Kota Bekasi
		2.23.0 2.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.23.0 2.2.01 .01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan		1 layanan	150,000,000	1 layanan	180,000,000	1 layanan	200,000,000	1 layanan		Kepala Bidang PKPKBP	Kota Bekasi
		2.23.0 2.2.01 .02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan		5 Perpustakaan sekolah (pembangunan perpustakaan Daerah Kota Bekasi)	400.000.000	10 perpustakaan sekolah	40.500,000,000	15 Perpustakaan sekolah	500,000,000	15 Perpustakaan sekolah		Kepala Bidang PKPKBP	Kota Bekasi
		2.23.0 2.2.01 .04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan		5 Perpustakaan sekolah	100,000,000	10 perpustakaan sekolah	150,000,000	15 Perpustakaan sekolah	200,000,000	15 Perpustakaan sekolah		Kepala Bidang PKM	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.23.0 2.2.01 .06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang		200 orang	200.000.000	150 orang	300,000,000	200 orang	400,000,000	200 orang		Kepala Bidang PKM	Kota Bekasi
		2.23.0 2.2.01 .09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar		2000 eks	400.000.000	2000 eks	400,000,000	2000 eks	400,000,000	2000 eks		Kepala Bidang PKPKBP	Kota Bekasi
		2.23.0 2.2.01 .10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		2 dokumen	100.000.000	2 Dokumen	115,000,000	2 Dokumen	120,000,000	2 Dokumen		Kepala Bidang PKPKBP	Kota Bekasi
				Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persentase	53.75	54		55		56		56		Kepala Bidang PKM	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2.23.0 2.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
		2.23.0 2.2.02 .01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus		9 lokus	200.000.000	11 lokus	325,000,000	13 lokus	400000000			Kepala Bidang PKM	Kota Bekasi
		2.23.0 2.2.02 .02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan		0	200.000.000	12 perpustakaan masyarakat	350,000,000	12 perpus takaan masyar akat	400,000,000			Kepala Bidang PKPKBP	Kota Bekasi
		2.23.0 2.2.02 .03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Orang		0	100.000.000	2 lomba 8 orang	200,000,000	2 lomba 8 orang	250,000,000			Kepala Bidang PKM	Kota Bekasi
		2.23.0 2.2.02 .04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah	Perpustakaan		3 perpustakaan	100,000,000	3 perpustakaan	150,000,000	3 perpus takaan	200,000,000			Kepala Bidang PKPKBP	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kabupaten/Kota yang Dikembangkan												
		2.23.0 2.2.02 .05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang		2 Orang	150,000,000	2 Orang	150,000,000	2 Orang	200,000,000			Kepala Bidang PKM	Kota Bekasi
URUSAN PENUNJANG																
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja				Nilai AKIP	Nilai										Kepala Disarpus da	Kota Bekasi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks										Kepala Disarpus da	Kota Bekasi
					Nilai AKIP											
		X.XX.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	%	100	100	100	180,000,000	100	3,715,000,000	100	3,765,000,000	100		Sekretaris Disarpus da
	X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.0 1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	2	2	5,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2		Perenca naan	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2		Perenca naan	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	0	0	2	20,000,000	2	30,000,000	2		Perenca naan	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
		X.XX.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	60 ASN	60 ASN	11.054.071. 000	60 ASN	12.164.752.0 00	60 ASN	12.164.752.00 0			Keuanga n	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.0 1.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			3,000,000		30,000,000		30,000,000			Keuangan	Kota Bekasi
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		%	100%	100%	2,300,000,000	100%	2,350,000,000	100%	2,400,000,000	100%		Sekretaris Disarpusda	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
		X.XX.0 1.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		70 Orang	50,000,000	70 Orang	100,000,000	70 Orang	100,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.05 .10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	0	30 Orang	50,000,000	30 Orang	50,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Orang		0	0	70 Orang	100,000,000	70 Orang	100,000,000			Umpeg	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Perundang- Undangan												
				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	%	100	100		100		100		100		Sekretaris Disarpusda	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
		X.XX.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	20,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	208.482.000	1	150,000,000	1	150,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	30,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	146.072.000	3	250,000,000	3	250,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	35.000.000	2	150,000,000	2	150,000,000			Umpeg	Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokume n	1	1	30,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3	3	25,000,000	3	75,000,000	3	75,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	70,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokume n	10	10	15,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokume n	0	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.0 1.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	0	0	1	150,000,000	1	150,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	43	200,000,000	43	200,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretar is Disarpus da	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		X.XX.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	152.000.000	12	350,000,000	12	400,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.140.290.000	12	1,200,000,000	12	1,200,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN (2022)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAA N DAERAH		UNIT KERJA PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		X.XX.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6 Kendaraan Dinas Jabatan	150,000,000	6 Kendaraan Dinas Jabatan	250,000,000	6 Kendar aan Dinas Jabatan	250,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15 Kendaraan Dinas Operasion al	145,000,000	15 Kendaraan Dinas Operasion al	200,000,000	15 Kendar aan Dinas Operasi onal	200,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
			Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang di pelihara	Unit	1	1	150,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000			Umpeg	Kota Bekasi
		X.XX.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	164	164	96.300,000	164	150,000,000	164	150,000,000			Umpeg	Kota Bekasi

BAB VII **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah selama Tiga Tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2024-2026. Target indikator kinerja ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama Tiga Tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan prima dan tata kelola yang akuntabel, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi menetapkan tujuan strategis yaitu “meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja”. Penetapan tujuan ini dilandasi oleh tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan perpustakaan yang cepat, tepat, dan berkualitas, serta kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, arah kebijakan nasional dan daerah menekankan pentingnya reformasi birokrasi, khususnya dalam aspek pelayanan publik dan akuntabilitas, sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, serta ketentuan perencanaan pembangunan berbasis kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagai turunan dari tujuan tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi. Sasaran ini diwujudkan melalui upaya peningkatan aksesibilitas layanan, baik fisik maupun digital, peningkatan profesionalisme

dan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja yang digunakan antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta ketepatan waktu dan kelengkapan laporan kinerja (LKjIP).

Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi yang ditempuh meliputi digitalisasi layanan perpustakaan seperti pengembangan katalog daring dan layanan e-book, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi internal. Dengan strategi yang terarah dan indikator kinerja yang terukur, diharapkan kualitas pelayanan Dinas Perpustakaan semakin meningkat, kepercayaan publik terhadap institusi semakin kuat, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dapat terwujud secara nyata.

Penetapan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah” didasarkan pada pentingnya pengelolaan arsip yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arsip merupakan sumber informasi yang vital dalam mendukung kelancaran administrasi, pengambilan keputusan, pembuktian hukum, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, pengelolaan arsip yang baik menjadi indikator penting dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, serta keberlanjutan penyimpanan memori organisasi. Oleh karena itu, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi menetapkan tujuan strategis ini sebagai langkah fundamental dalam memperkuat sistem kearsipan internal pemerintah daerah.

Sebagai bentuk operasionalisasi tujuan tersebut, dirumuskan sasaran strategis berupa “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kearsipan Pemerintahan”. Sasaran ini mencerminkan kebutuhan untuk tidak hanya memperbaiki infrastruktur dan regulasi kearsipan, tetapi juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola arsip di setiap perangkat daerah. Upaya pencapaian sasaran ini diarahkan pada tersusunnya arsip yang terklasifikasi secara baik, penerapan sistem kearsipan berbasis elektronik (e-arsip), serta meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pengelolaan arsip. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan antara lain meningkatnya nilai pengawasan kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), meningkatnya jumlah perangkat daerah yang memiliki unit kearsipan aktif, serta meningkatnya jumlah SDM kearsipan yang tersertifikasi atau telah mengikuti bimbingan teknis kearsipan.

Strategi pencapaiannya meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman kearsipan daerah, penguatan sistem kearsipan digital, pelaksanaan pelatihan dan asistensi teknis bagi pengelola arsip di perangkat daerah, serta peningkatan pengawasan dan pembinaan secara berkala. Dengan strategi yang konsisten dan terintegrasi, diharapkan kapasitas

kelembagaan dan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terwujudnya pemerintahan yang tertib administrasi, akuntabel, dan memiliki daya ingat institusional yang kuat.

Penetapan tujuan “Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat” dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi merupakan respon strategis terhadap tantangan rendahnya minat baca di tengah masyarakat, serta pentingnya literasi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Di era informasi dan digitalisasi seperti saat ini, kemampuan membaca dan memahami informasi tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing masyarakat. Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem literasi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga tujuan ini menjadi sangat relevan dengan agenda pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat”. Sasaran ini mencakup upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang berkualitas, memperluas jangkauan layanan perpustakaan, serta menumbuhkan budaya baca sejak usia dini melalui berbagai program literasi berbasis komunitas, sekolah, keluarga, dan digital. Peningkatan pembangunan literasi tidak hanya ditandai dengan bertambahnya jumlah kunjungan ke perpustakaan, tetapi juga dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi, terbentuknya pojok baca di berbagai wilayah, serta tersedianya layanan perpustakaan keliling dan digital yang menjangkau daerah terpencil atau marginal.

Indikator pencapaian sasaran antara lain peningkatan jumlah pengguna aktif perpustakaan, peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat, bertambahnya jumlah kegiatan literasi yang melibatkan masyarakat, serta meningkatnya kolaborasi dengan berbagai pihak seperti sekolah, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Strategi yang dijalankan mencakup penyediaan dan penyebaran bahan bacaan yang relevan, penguatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pembentukan taman bacaan masyarakat, pelaksanaan kampanye gemar membaca, serta pengembangan layanan literasi digital. Melalui strategi ini, Dinas Arsip dan Perpustakaan diharapkan mampu menjadi motor penggerak literasi di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing tinggi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Disarpusda dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
Tahun 2024-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Renstra PD		
						2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	Nilai	79.99	81	A 80	A 80.5	A 81
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82.8	77	80	81	82
		Nilai AKIP	Nilai	79.99	81	A 80	A 80.5	A 81
2	Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	Persentase	75	75	76	77	78
2.1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	Indeks	68.39	75	62	63	64
3	Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks	N/A	N/A	41	42	43
3.1	Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	N/A	N/A	53	54	55

Sumber : Data diolah Sub Bagian Perencanaan Disarpusda Kota Bekasi, 2022

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program Disarpusda yang Mengacu pada RPD Kota Bekasi
Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
1	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
3	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
4	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						
1	Penambahan khasanah arsip statis pada depo arsip	278 Boks	322 Boks	366Boks	410 Boks	410 Boks
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib	22.72% 10 opd	36.36% 16 opd + 1 Lembaga / BUMD	45.45% 20 OPD + 2 Lembaga / BUMD	56,81% 25 OPD + 3 Lembaga / BUMD	56.81% 25 OPD + 3 Lembaga / BUMD
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
1	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Membaca	1544 (data 2021)	1556	1568	1580	1580
2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	53,75%	54%	55%	56%	56%

BAB VIII

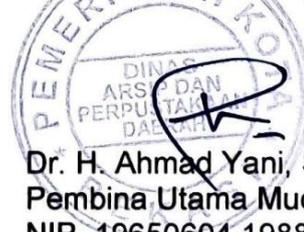
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bekasi merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi selama periode 2024-2026.

Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan serta memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Pencapaian kinerja pelayanan kearsipan dan perpustakaan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan merupakan bagian pencapaian kinerja sekaligus pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Bekasi periode 2024-2026, yang dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi.

Bekasi, 28 Februari 2023
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Daerah Kota Bekasi,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd., MM., MBA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650604 198803 1 019